BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat, hasil penerimaan pajak tersebut di gunakan untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan), semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak, pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri, hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu pajak **M. Said (2003).**

Pajak menurut **S.I. Djajadiningrat** dalam **Siti Resmi (2009:01),** menyatakan bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Penerimaan pajak menurut **Suryadi (2006)** merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan

sedangkan definisi penerimaan pajak berdasarkan **Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2001)**, adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut **Marsyahrul (2005:21)**, Penerimaan negara atas pajak bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak bumi bangunan, dan pajak lainnya. Berdasarkan **Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran (2011)** dilihat dari komposisinya, penerimaan perpajakan masih didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri, terutama pajak penghasilan (PPh) nonmigas serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap penerimaan perpajakan masing-masing mencapai Rp173.219,5 miliar (44,8 persen) dan Rp112.349,9 miliar (29,1 persen).

Masih berdasarkan **Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran (2011),** pada realisasi tersebut, penerimaan perpajakan dalam semester I 2011 diperkirakan mencapai Rp386.691,6 miliar atau 45,5 persen dari target dalam APBN 2011, apabila dibandingkan dengan realisasi semester I 2010, perkiraan realisasi penerimaan perpajakan pada semester I 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp49.115,5 miliar atau 14,5 persen, perkembangan penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2010 – 2011 dapat dilihat pada **Tabel 1.1** adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan 2010-2011
(Miliar Rupiah)

Uraian	2010			2011			
	APBN-P	Semester I	% thd APBN-P	APBN	Real. s.d. Mei	Perkiraan Semester I	% thd APBN
1 Pajak Dalam Negeri	720.764,5	326.263,7	45,3	827.246,2	302.997,1	357.796,7	43,3
a. Pajak Penghasilan	362.219,0	178.627,6	49,3	420.493,8	178.721,8	207.040,7	49,2
-Migas	*55.382,4*	*30.639,1*	*55,3*	*55.553,6*	*28.866,1*	*33.821,2*	*60,9*
-Non Migas	*306.836,6*	*147.988,5*	*48,2*	*364.940,2*	*149.855,7*	*173.219,5*	*47,5*
b. Pajak Pertambahan Nilai	262.963,0	99.491,0	37,8	312.110,0	92.248,0	112.349,9	36,0
c. Pajak Bumi dan Bangunan	25.319,1	11.387,1	45,0	27.682,4	1.542,8	2.187,2	7,9
d. BPHTB	7.155,5	2.996,4	41,9	-	(0,7)	-	-
e. Cukai	59.265,9	32.130,2	54,2	62.759,9	28.943,3	34.343,4	54,7
f. Pajak Lainnya	3.841,9	1.631,4	42,5	4.200,1	1.541,9	1.875,7	44,7
2 Pajak Perdagangan Internasional	**22.561,4**	**11.312,5**	**50,1**	**23.009,3**	**23.576,2**	**28.894,9**	**125,6**
a. Bea Masuk	17.106,8	9.496,6	55,5	17.902,0	9.920,3	12.096,5	67,6
b. Bea Keluar	5.454,6	1.815,9	33,3	5.107,3	13.655,9	16.798,4	328,9
Total Penerimaan Perpajakan	743.325,9	337.576,1	45,4	850.255,5	326.573,3	386.691,6	45,5

***) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan**
Sumber : Kementrian Keuangan dalam Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2011

Mengingat pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan dan besarnya potensi penerimaan pajak negara ini, pemerintah tentu akan berusaha keras meningkatkan jumlah penerimaan pajak, namun sampai saat ini upaya tersebut dinilai pencapaiannya masih belum optimal, karena di lihat dari sisi pengawasan masih lemah, berdasarkan perhitungan Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR, seharusnya penerimaan pajak pada tahun 2009 lalu dapat meningkat 16% dari penerimaan pajak sebelumnya pada tahun 2008 yang hanya 12%, tapi karena aksi-aksi/kecurangan yang di lakukan oleh oknum pajak. Maka penerimaan negara diperkirakan sampai tergerus sekitar 23%, jumlah uangnya lebih dari Rp100 triliun **Sakti Nasution (2010).**

Dari survey yang di lakukan oleh *Transparency International Indonesia (TII)* akhir tahun 2004 yang lalu, DJP juga sebagai lembaga terkorup ke dua setelah Bea dan Cukai, dugaan adanya penyelewengan penerimaan pajak menurut survei *Transparancy International Indonesia (TII)* akhir tahun 2004 terhadap 900 pengusaha di 21 kota menemukan kebocoran pajak bisa mencapai 40 % dari tahun sebelumnya yang berkisar 38%, kebocoran tersebut di sebabkan karena wajib pajak tidak membayar pajak dengan nilai semestinya **Emmy Haflid (2005).**

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Pajak KPP Pratama Bandung Karees

Tahun	Jumlah Penerimaan
2007	895.627.354.393
2008	401.159.813.144
2009	606.678.088.748
2010	536.733.703.465

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Berdasarkan tabel 1.2 di atas jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama terjadi penurunan dan penaikan penerimaan pajak, jumlah penerimaan pajak pada tahun 2007 sebesar 895.627.354.393, tahun 2008 sebesar 401.159.813.144, tahun 2009 sebesar 606.678.088.748, dan tahun 2010 sebesar 536.733.703.465, dari tabel 1.2 di atas dapat terlihat bahwa telah terjadi penurunan penerimaan pajak yang drastis pada tahun 2008 yaitu turun sebesar 494.467.541.249 dari tahun 2007, penurunan penerimaan pajak juga terjadi pada tahun 2010 yaitu turun sebesar 69.944.385.283 dari tahun 2009 dan penaikan penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2009 yaitu naik sebesar 205.518.275.604 dari tahun 2008.

Musgrave dan Musgrave (2003:47) berpendapat bahwa terdapat dua klasifikasi biaya yang timbul sebagai konsekuensi pengenaan pajak, dua jenis biaya tersebut adalah *tax operating cost* (meliputi *administrative* dan *compliance*

cost/biaya kepatuhan pajak) serta *distortion cost in household choices* (yakni, distorsi pajak yang menyebabkan keengganan produsen untuk memproduksi barang/jasa akibat keengganan konsumen atau pihak rumah tangga untuk mengkonsumsi barang/jasa karena *overpricing* akibat tingginya pajak yang selanjutnya berakibat kepada menurunnya agregat penerimaan pajak).

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus di keluarkan oleh Wajib pajak dalam berbagai literatur disebut dengan biaya kepatuhan/*Compliance cost*, idealnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya **Nurmantu (2003:83).**

Namun, nyatanya *tax compliance cost* ini begitu memberatkan wajib pajak hal ini menyebabkan orang malas untuk membayar pajak, setiap orang tidak ingin berurusan dengan hal yang rumit, apalagi membutuhkan biaya ekstra, jika mau membayar pajak misalnya, selain WP harus membayar pajaknya, maka WP juga harus mengurusi segala administrasinya di bank/kantor pos, membaca SPT serta mengisinya dan mengirim ke kantor pajak membuat WP mengeluarkan biaya transportasi, memang sudah ada penerapan *e-filing*, namun tentunya hal ini masih terbatas karena penetrasi internet di Indonesia masih rendah, tingginya biaya kepatuhan pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak yang rendah **Rinella Putri (2008).**

Seperti yang di katakan oleh **S.O Uremadu & J.C.Ndulue (2011)** bahwa *"High cost of compliance issued by the taxpayerand administrative costs to negatively affect the government's national output of taxes collected inthis tax revenue is low"*. dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa tingginya biaya kepatuhan yang di keluarkan oleh wajib pajak dan biaya administrasi kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap output nasional dari pajak dikumpulkan dalam hal ini penerimaan pajak menjadi rendah.

Menurut **Sandford (2003)** *"Compliance costs here not only the cost in terms of money, but also time and thought, of which cost money are the direct costs of cash money (cash) issued by the taxpayer in order to meet tax obligations, the obligations of taxation, taxpayers have to spend money in addition to paying back taxes, at least for travel and administrative costs to the bank or post office to make deposits, payments to tax consultants,*

Masih menurut **Sandford (2003)** *In addition it is the time cost of time spent by the taxpayer in making the taxpayer the tax obligations should also take the time to read the instructions charging SPT, fill it and send it to the Tax Office, and the cost is a sense of psychological stress and a variety of fear or anxiety due to tax evasion, taxpayers were saddled mind lest his understanding of the different tax laws with the understanding of the tax officers were later charged with tax evasion"*.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa biaya kepatuhan disini bukan hanya biaya dalam artian uang, tapi juga waktu dan pikiran, diantaranya *direct money cost* adalah biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan

wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mengeluarkan uang selain untuk membayar pajak terutang, minimal untuk biaya perjalanan dan administrasi ke bank atau kantor pos untuk melakukan penyetoran, pembayaran kepada konsultan pajak **Sandford (2003).**

Selain itu *time cost* adalah waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak juga harus meluangkan waktu untuk membaca petunjuk pengisian SPT, mengisinya dan mengirimkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, dan *psychological cost* adalah rasa *stress* dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evasion,* wajib pajak juga dibebani pikiran takut kalau-kalau pemahamannya atas peraturan perpajakan berbeda dengan pemahaman petugas pajak kemudian dituduh melakukan *tax evasion* **Sandford (2003).**

Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia dapat diketahui bahwa jumlah responden yang mengakui pernah membayar suap ke kantor pajak adalah yang paling besar dibandingkan dengan institusi yang lain sepeti Bea Cukai, Kepolisian dan Lembaga Peradilan, sedangkan untuk total jumlah uang suap setahun, kantor pajak menduduki peringkat kedua setelah Bea Cukai, hasil survei Transparansi Internasional Indonesia tersebut menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak di Indonesia masih sangat besar berkaitan dengan besarnya biaya suap yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk pengurusan pajak **Rinella Putri (2008).**

Menurut **Darmin Nasution (2009),** penerimaan pajak dalam periode Januari-Maret 2007 adalah sebesar Rp 103,1 triliun atau meningkat 35% dibanding periode yang sama di tahun 2006 yang hanya mencapai Rp 76,4 triliun, jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan terbesar selama enam tahun terakhir, namun demikian angka-angka penerimaan pajak yang disampaikan masih simpang siur karena tidak ada satu angka pun yang diyakini kebenarannya.

Angka-angka penerimaan pajak yang masih simpang siur tersebut disebabkan oleh sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang merupakam sistem informasi di Departemen Keuangan yang mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum solid, oleh karena itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat agar tidak terjadi kebocoran **Wiyono (2007).**

Di negara Amerika Serikat pelayanan informasi mengenai pajak sudah menjangkau wajib pajak sehingga bila ada wajib pajak yang membutuhkan informasi pajak, dapat secara langsung menelepon pusat informasi pajak secara gratis, di Inggris informasi pajak hampir bisa di peroleh dalam setiap acara pameran, di Australia pemerintah menyediakan mobil-mobil yang mengantarkan informasi perpajakna secara *door to door*, sedangkan di Swedia informasi pajak di sampaikan melalui karikatur yang penuh rasa humor, sedangkan di Indonesia informasi mengenai pajak masih sulit di dapatkan karena belum ada sistem layanan informasi yang mudah di jangkau wajib pajak, kadang-kadang brosur

yang di sebarkanpun masih sangat terbatas, bahasanya kurang komunikatif, kurang di gemari **Agus Suparman (2005).**

Keterbatasan inilah yang menjadi salah satu sebab masyarakat wajib pajak kurang mengenal betul arti, keterlibatan, dan *urgensi* pajak dalam perekonomian Indonesia, bahkan masyarakat wajib pajak kadang menghindari pajak atau anti pajak karena pengetahuan pajaknya masih rendah, hal ini menimbulkan kesadaran membayar pajak yang rendah pula dan juga menyebabkan penerimaan pajak yang rendah, jadi, jika pengelolaan Sistem informasi kurang baik maka dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan penerimaan pajak **Agus Suparman (2005).**

Fenomena mengenai sistem informasi juga terjadi pada KPP Pratama Bandung Karees yang di katakan oleh salah satu AR (*Account Representative*) yang ada pada seksi WASKON (Wawasan dan Konsultasi) I yaitu **Miftachul Munir (2011)** mengenai proses penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) dengan menggunakan sistem informasi, cara pengerjaannya belum optimal karena para AR menghadapi kendala-kendala yaitu sebagai berikut :

1) "AR harus memasukan data WP satu-satu tidak bisa langsung sekaligus sehingga proses penginputan data nya cukup memakan waktu yang lama,
2) Data yang ada di sistem harus di sesuaikan kembali dengan data pelaporan SPT yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalkan kesalahan yang akan terjadi,
3) Kesulitan mengakses jaringan internet pada saat-saat sibuk, sehinggga data yang ada di jaringan internet lama untuk di aksesnnya,

Permasalahan dari sistem informasi di atas tentu menghambat proses di terbitkannya STP dan tentu saja hal itu menyebabkan proses penerimaan pajak juga terhambat sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal".

Seiring perkembangan teknologi saat ini, penggunaan sistem informasi merupakan keharusan untuk memperlancar aktivitas-aktivitas dalam perusahaan agar pelaksanaan dapat lebih cepat, akurat dan efisien **oyt (2011)**.

Sistem informasi menurut **James A. Hall (2007:6)** adalah "*Series of formal procedures by which data is collected and processed into information distibuted to the users ",* dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengertian biaya kepatuhan adalah "Serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan diproses menjadi informasi dan di distribusikan ke para pengguna.

Pengertian lain tentang sistem informasi adalah merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian **Laudon** dalam **Azhar Susanto (2008:52**).

Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data, semua elemen ini merupakan komponen fisik **Edwin Ho (2002).** Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (building blok), yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol, semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran **Billy N Mahamudu (2002)**.

Langdon (2004) mengutip hasil survei tentang peranan teknologi dalam modernisasi administrasi perpajakan perusahaan yang dilakukan *Association for Computers and Taxation (ACT)* di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa *"information systems has become a trigger (enabler) for taxation practices more efficient, The next* **Langdon (2004)** *suggests the need foran integrated approach to automated tax calledecosystem, where all the basic functionssimultaneously in the system thereby allowing the function to handle all of the services include tax planning, compliance, and audit management, so that it affects the tax revenue"*.

Dari definisi pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa menurut **Langdon (2004),** "sistem informasi telah menjadi pemicu *(enabler)* untuk praktik-praktik perpajakan yang lebih efisien, selanjutnya **Langdon (2004)** mengemukakan perlunya suatu pendekatan terpadu yang disebut dengan *automated tax ecosystem*, dimana semua dasar sistem dalam berfungsi secara bersamaan sehingga memungkinkan fungsi pajak menangani semua layanan meliputi perencanaan, kepatuhan, dan manajemen audit, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak".

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memberikan judul pada penelitian ini yaitu:

"Pengaruh Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kanwil Jawa Barat I)".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan sistem informasi yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang belum baik dapat mempengaruhi keoptimalan Penerimaan Pajak.
2. Kesulitan mengakses jaringan internet pada saat sibuk dalam sistem informasi dapat mempengaruhi keoptimalan Penerimaan Pajak.
3. Tingginya biaya kepatuhan pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak sehingga mengakibatkan penerimaan pajak yang rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Bagaimana Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan sistem informasi dan biaya kepatuhan terhadap penerimaan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk :

1) Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2) Untuk mengetahui Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3) Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian adalah untuk :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan dan Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1) **Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan**

   Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh sistem informasi dan biaya kepatuhan terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2) **Bagi Peneliti**

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan dan Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

3) Bagi KPP di Kanwil Jawa Barat I

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan dan Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

4) Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan dan Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kanwil Jawa Barat 1 diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
4	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
5	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6	KPP Pratama Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
8	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
9	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu persiapan dan pelaksanaan penelitian skripsi yaitu pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2012				April 2012				Mei 2012				Juni 2012				Juli 2012				Agustus 2012			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul																								
	d. Mencari Perusahaan																								
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan draf skripsi																								